

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN**  
**PELIMPAHAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT**  
**(STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO)**



**Rismunandar Katili**  
**NIM. 21.C2.0052**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2022**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN**  
**PELIMPAHAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT**  
**(STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Kesehatan



**RISMUNANDAR KATILI**  
**NIM. 21.C2.0052**

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rismunandar Katili

NIM : 21.C2.0052

Prodi/ Konsentrasi : Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan Judul *Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam melaksanakan Pelimpahan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit (studi kasus di Provinsi Gorontalo)* tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



Rismunandar Katili



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Tanggung-jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Pelimpahan  
Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit

Diajukan oleh : Rismunandar Katili

NIM : 21.C2.0052

Tanggal disetujui : 27 Juni 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : I Edward Kurnia S.I.

Pembimbing 2 : Paulus Johannes Soepratignja

Penguji 1 : I Edward Kurnia S.I.

Penguji 2 : Paulus Johannes Soepratignja

Penguji 3 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=21.C2.0052](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=21.C2.0052)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

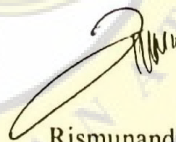
Nama : Rismunandar Katili  
Prodi/ Konsentrasi : Program Studi Magister Hukum Kesehatan  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam melaksanakan Pelimpahan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit (studi kasus di Provinsi Gorontalo)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang Menyatakan



Rismunandar Katili

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit (Studi Kasus Di Provinsi Gorontalo)”.

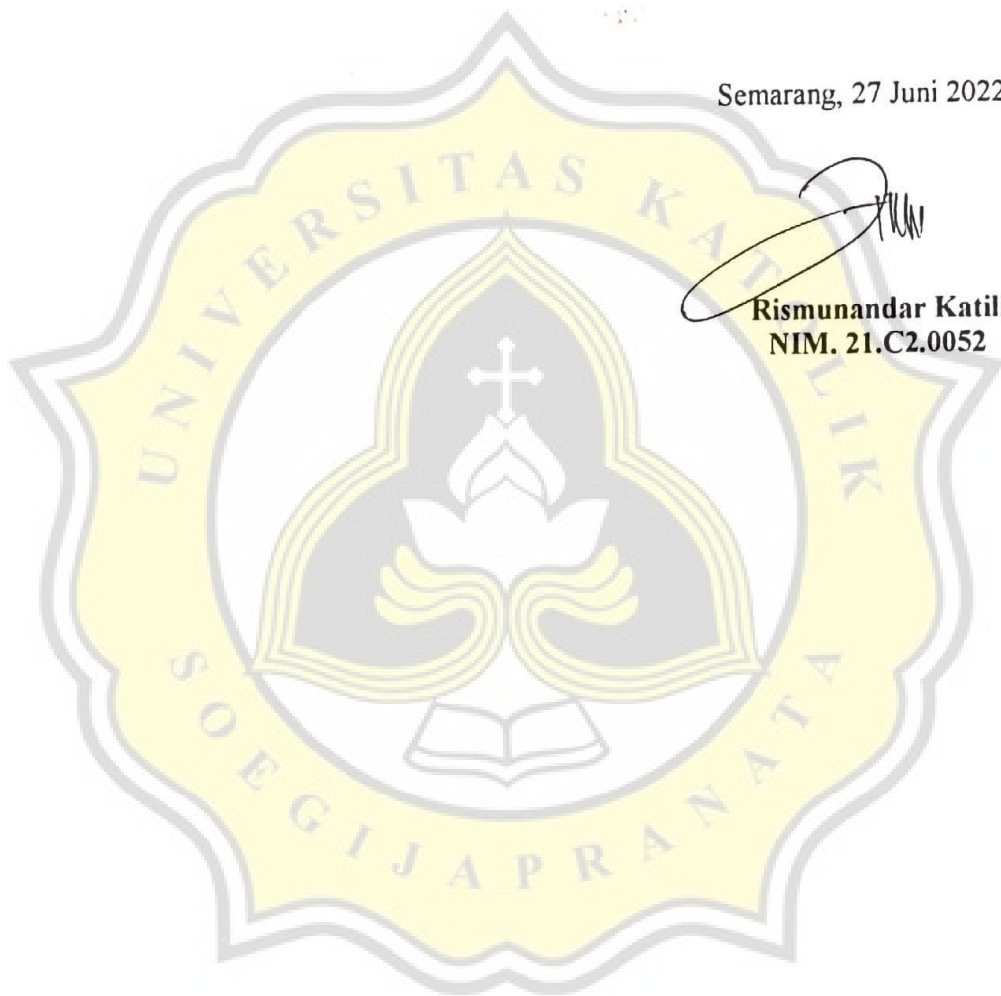
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program strata dua (S2) di Universitas Katolik Soegijapranata. Selama proses penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, yang untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Jawa Tengah
2. Dr. Marcela Elwina, S.H., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Jawa Tengah
3. Dr. Endang Wahyati Y, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata
4. Dr. dr. I. Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK., Msi.Med selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, masukan dan arahan selama penyusunan tesis
5. PJ Soepratignja., S.H., Sp.N selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, masukan dan arahan selama penyusunan tesis

6. Alm. Valentinus Suroto., S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan masukan dan arahan saat perbaikan tesis
7. Dr. B. Resti Nurhayati., S.H., M.Hum selaku dosen pengganti penguji yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya, serta memberikan masukan saat perbaikan tesis
8. Seluruh dosen dan staf non akademik di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan selama kuliah.
9. Kedua orang tua Bapak Dr. Ansar Katili, M.Kes dan Ibu Dra. Yulina Utina serta keluarga yang telah mendukung dan mendoakan demi kelancaran penyusunan tesis ini.
10. Istriku tercinta Clara Shinta Dilapanga S.KM dan putra pertama kami Maha Katili yang menjadi penyemangat dalam penyusunan tesis ini.
11. Teman-teman angkatan XXVII yang telah membantu dan mendukung penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya saya sebagai peneliti.

Semarang, 27 Juni 2022





## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum .....	7
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Desain Penelitian.....	9
3. Variabel dan Definisi Operasional .....	10
4. Jenis Data .....	11
5. Metode Pengumpulan Data .....	13
6. Metode Sampling .....	15
7. Metode Analisis Data .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tanggung Jawab Hukum.....	18
1. Perspektif Hukum Perdata.....	18
2. Perspektif Hukum Administrasi .....	25
3. Perspektif Hukum Pidana.....	29
B. Perawat .....	32
1. Konsep Keperawatan.....	32
2. Hak dan Kewajiban Perawat .....	32
3. Asas Praktik Keperawatan .....	33
C. Tindakan Kedokteran .....	35
D. Rumah Sakit .....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum Provinsi Gorontalo .....	43
2. Gambaran Umum Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit .....	45
3. Hasil Wawancara.....	54
B. Pembahasan .....	63
1. Pengaturan Pelimpahan Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit .....	63
2. Pelaksanaan Pelimpahan Tindakan Kedokteran kepada Perawat di Rumah Sakit .....	67

3. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit .....	81
BAB IV PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA	



## DAFTAR SINGKATAN

AKABA	: Angka Kematian Balita
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
BPRS	: Badan Pengawas Rumah Sakit
BTCLS	: <i>Basic Training Cardiac Live Support</i>
DPJP	: Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
EKG	: Elektrokardiogram
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KUHAP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang Hukum Perdata
Mendiknas	: Menteri Pendidikan Nasional
MENKES	: Menteri Kesehatan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PPNI	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SK	: Surat Keputusan
SIKP	: Surat Izin Kerja Perawat
SIPP	: Surat Izin Praktek Perawat
STR	: Surat Tanda Registrasi
STRP	: Surat Tanda Registrasi Perawat
THT	: Telinga, Hidung, Tenggorokan
UU	: Undang-Undang
UUK	: Undang-Undang Kesehatan
UURS	: Undang-Undang Rumah Sakit

## ABSTRAK

Tanggung jawab hukum dalam melaksanakan pelaksanaan tindakan kedokteran merupakan hal yang tegas dan jelas harus diketahui tenaga medis termasuk perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat di rumah sakit dan tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, peneliti memilih empat rumah sakit yang memenuhi syarat dan bersedia dilakukan penelitian yaitu RSUD Prof Dr H Aloe'i Saboe, RSUD Dr M Mohammad Dunda, RSUD Toto Kabila, RSUD Ainun Habibi.

Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana pengaturan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, bagaimana pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat di rumah sakit, bagaimana tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, desain ini digunakan untuk melihat gambaran gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik kondisi hukum, pendekatan *yuridis sosiologis* menjadi metode pendekatan hukum yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini akan digunakan metode sampel *purposive sampling*, dengan melibatkan dua perawat pelaksana, komite keperawatan serta dokter yang diwakili komite medik di setiap rumah sakit.

Hasil penelitian di rumah sakit Provinsi Gorontalo belum memiliki format khusus dalam pelimpahan tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter kepada perawat, maka biasanya dokter menerapkan TBaK (Tulis, Baca, Konfirmasi) dan menerapkan sasaran *patient safety*. Tindakan yang pada kenyataannya dilakukan oleh para perawat yang sebenarnya termasuk tindakan medis atau yang dilakukan oleh dokter. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan praktik keperawatan sehingga menimbulkan *grey area*.

Penerima dan pelaksana perintah harus sama-sama mengetahui bahwa perintah yang diterima diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat tersebut, maka bisa dibedakan suatu peristiwa dimana orang menanggung akibat suatu tindakan hukum kepada orang lain dapat berupa *lastgeving*, *volmacht*, atau *zaakwarneming*.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Hukum, Pelimpahan Tindakan Kedokteran, Perawat

## ABSTRACT

Legal liability in performing medical actions should be decisively and clearly understood by medical personnel, particularly nurses. This research aims at determining the regulation in the delegation of authority over medical actions to nurses, legal liability of nurses in the implementation of the delegation of medical actions. Four hospitals are chosen as they meet the requirements and are willing for the research conducted. The hospitals are the Regional Public Hospitals of Prof. Dr. H Aloe Saboe, Dr. M Mohammad Dund, Toto Kabila, and Ainun Habibi.

Problem statement in this study, how was the arrangement of delegation of medical action in hospital, how was the delegation of medical action to the nurses in hospital, how is the legal responsibility of nurses in delegating medical action to the nurses in hospital. The research design is descriptive to see the description of legal events or characteristics of legal conditions. This research method employs the sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. This research uses a committee, and a doctor represented by the medical committee.

Findings reveal that the regional public hospitals in Gorontalo Province are lack of a specific written form for the delegation of authority over medical actions from doctors to nurses. The doctors tend to apply the *TBaK* (Write, Read, Confrim) approach and implement patient safety goals, the medical actions that are supposedly performed by doctors but, in fact, carried out by nurses. Such practices often cause gray area.

Both recipient and axecutor of the authority must agree that the authority is given by an authorized official and falls within the scope of the official's authority. Hence, it can be discerned that an event in which a person bears the consequences of legal action of a person may be in the form of *lastgeving*, *volmacht*, or *zaakwarneming*

**Keywords :** Legal Liability, Delegation of Authority Over Medical Action, Nurses